



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM/AUDIENSI  
KOMISI IX DPR RI

- Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)/Audiensi  
Dengan : Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)  
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020  
Waktu : Pukul 12.10 s.d. 13.45 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta  
Ketua Rapat : Dra. Sri Rahayu/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Acara :  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.  
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**  
33 dari 51 orang Anggota dengan rincian:
1. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
    1. Dra. Sri Rahayu
    2. Dra. Elva Hartati, S.I.P., M.M.
    3. Dr. H. Edy Wuryanto, S.Kp., M.Kep.
    4. H. Imam Suroso, S.H., S.Sos.
    5. Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum.
    6. Dr. Dewi Aryani, M.Si
    7. Krisdayanti
    8. H. Abidin Fikri, S.H., M.H.
  2. **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
    1. Emanuel Melkiades Laka Lena
    2. Delia Pratiwi Sitepu, SH
    3. Drs. H. Darul Siska
  3. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
    1. Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M.
    2. Ade Rezki Pratama, SE, MM
    3. Obon Tabroni
    4. drg. Putih Sari

**4. FRAKSI PARTAI NASIONALIS DEMOKRAT**

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E.
2. Hj. Sri Wulan, SE
3. Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T.
4. drg. Hj. Hasnah Syam, Mars.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

1. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Hj. Nur Nadlifah, S.Ag. M.M.
3. Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P.
4. Ir. Nur Yasin, M.B.A., M.T.
5. H. Haruna, M.A., M.B.A.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

1. Dra. Lucy Kurniasari
2. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.
3. Muhammad Dhevy Bijak

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

1. H. Ansory Siregar
2. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
3. Dr. Hj., Netty Prasetiyani, M.Si.
4. H. Alifuddin, S.E., M.E.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

1. Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**

1. Sy. Anas Tahir

**KETUA RAPAT (Dra. SRI RAHAYU):**

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*  
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.  
*Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan.*

Yang terhormat, Saudara Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dalam hal ini hadir Pak Andi Gani Nenawea, S.H, kemudian hadir pula Wakil Presiden KSPI atas nama Raden Rahmat Abdullah, dan para Bapak-bapak sekalian, tidak ada ibunya ini, yang turut bersama-sama dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat *Alloh Subhaanahuata'aala* bahwa pada siang hari kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga Bapak/Ibu sekalian kita bisa hadir di ruangan Komisi IX ini mudah-mudahan akan selalu diberikan hidayah oleh *Alloh Subhaanahuata'aala*.

Ini saya Sri Rahayu/Wakil Ketua Komisi IX bersama Pak Obon dari Fraksi Partai Gerindra, dan sebelah kiri saya adalah Pak Rahmad Handoyo dari Fraksi PDI Perjuangan. *Monggo*, Pak Rahmad.

Ini luar biasa dihadiri Bapak Wakil Ketua DPR.

Sekali lagi, yang terhormat Pak Rahmat Gobel/Wakil Ketua DPR RI.

Baru kali ini dihadiri oleh Pimpinan, kita berikan tepuk tangan.

Baik, Bapak/Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kegiatan audiensi ini marilah kita bersama-sama mendudukkan kepala sejenak memohon kepada *Alloh* Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan amanah kita sebagai manusia, baik ditugaskan di keluarganya sendiri maupun di petugas-petugas yang ada di luar itu.

Berdo'a menurut keyakinan kita masing-masing dipersilakan.

(DOA BERSAMA)

Terima kasih.

Acara pada saat ini adalah tunggal, yaitu menerima dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kehadiran Bapak/Ibu kemari adalah terkait dengan penyampaian pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw.

Sekarang ini katanya infonya dirubah ya, bukan Cipta Lapangan Kerja, sekarang diganti dengan Cipta Kerja. Jadi bukan tidak ada lapangan kerjanya. Bapak/Ibu sekalian katanya disingkat 'Cilaka' malah lebih tidak bagus, makanya 'lapangan' nya dihapus diganti dengan 'Cipta Kerja', *cluster* ketenagakerjaan.

Untuk menyingkat waktu kami akan mendengarkan dari Bapak/Ibu sekalian untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan harapan setelah keinginan dari Bapak/Ibu sekalian, khususnya dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Saya berikan kesempatan sepenuhnya untuk menyampaikan maksudnya.

Saya persilakan.

**PRESIDEN KSPI (GANI NENAWEA):**

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*  
salam sejahtera untuk kita semua.  
*Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan.*

Saya Andi Gani Nenawea/Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Disebelah kiri saya Wakil Presiden, Bung Abdullah. Di sebelah kiri saya perwakilan dari Jawa Timur/Ketua PDKEP, Bung Karji. Sebelah kiri ini Bung Jinto/Ketua PP Tekstil Salinan Kulit Seluruh Indonesia. Sebelah kanan saya Sekretariat Jenderal/Dr. Hermanto. Sebelah kanan saya, Doktor Nurdin. Ini isinya doktor semua. Buruh isinya doktor semua. Lalu sebelah kanan saya, Bung Ahmad/Ketua DPD Banten. Bung Marsudi dari Jawa Timur. Dan Bung William Yaniwea/Ketua DPD KSPSI DKI. Dan Bung Ferry.

Yang pertama, Ibu Sri Rahayu, KSPI adalah konfederasi buruh terbesar di Indonesia hasil verifikasi pemerintah. Kita menempati posisi pertama di peringkat terbesar konfederasi di Indonesia. Dan saya juga sebagai Pimpinan Konfederasi Buruh se-Asean. Saya pemimpin di 12 negara di Asean.

Pertama saya sedih, bingung mengungkapkan dari awal seperti apa. Kami ini konfederasi buruh pendukung Pak Jokowi dari tahun 2012. Saya sendiri saat itu masih menjabat sebagai presiden komisaris BUMN. Tapi akhirnya memimpin demo. Tidak tahu setelah demo ini mungkin saya di pensiunkan dini kelihatannya. Tapi itu resiko perjuangan. Saya sampaikan sampai tadi malam banyak teman-teman menyampaikan jangan pimpin aksi, biar sekjen saja. Belum pernah dalam sejarah preskom BUMN pimpin demo. Tapi saya ambil resiko itu. Karena sulit kalau tidak saya memimpin langsung di lapangan. Tidak bisa saya melihat anggota saya berjalan sendiri, berjuang sendirian.

Undang-undang ini agak aneh, RUU ini. Saya diundang Presiden khusus ke Istana Bogor, kita terbuka saja. Saya diajak bicara mengenai adanya terobosan hukum mengenai investasi. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi saya akan dukung *all out*, saya akan *support* sepenuhnya.

Di perjalanan saya sampaikan kepada Pak Jokowi, dan saya mengirim surat resmi dan saya bertemu langsung pada Presiden, diajak serta buruh dari awal supaya tidak ada kecurigaan. Tapi Menko Perekonomian/Pak Arilangga akhirnya membentuk satgas *omnibuslaw* yang terdiri daripada 22 orang. Ketua umumnya Ketua Umum Kadin, seluruhnya anggotanya ketua umum asosiasi. Saya kirim surat lagi kepada Pak Menko dan Presiden untuk mengingatkan pasti akan terjadi gejolak di buruh Indonesia. Karena dari awal seperti ada yang disembunyikan.

Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, "Anda orang dekatnya Presiden, konfederasi buruh pendukung Presiden, kok tidak punya *draft*". Akhirnya kita bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini. Akhirnya kami memiliki 7 *draft* sekaligus yang isinya berlainan semua. Dari awal inilah yang membuat penolakan yang begitu kuat di *omnibuslaw*.

Kalau di undang ke TV, kemana-mana, saya juga bingung pasal mana yang saya tolak. Karena saya belum pernah lihat *draft* sama sekali sampai hari ini. Dan tiba-tiba kemarin sore keluarlah SK Menko Perekonomian. Tiba-tiba sekali menjelang saya demo, dan diminta untuk kita melihat SK tersebut. Dan saya masuk dalam tim pengkajian. Dan berkomunikasi, tidak jelas itu. Tapi kita akan coba membahas dengan teman-teman konfederasi. Tapi niat baik pemerintah itu kita sambut baik. Tapi terlambat. Kenapa ketika semua sudah jadi masalah, dan terjadi penolakan dimana-mana dan tim itu baru dibentuk mengajak serta buruh. Yang paling penting buat kami, ketika KSPSI sebagai pendukung Presiden turun ke jalan artinya ada sesuat yang salah. Karena kami juga bingung, ini peraturannya mau dibawa kemana dan untuk siapa.

Presiden sudah mengingatkan di ratas, saya punya jejak digital rekamannya bahwa mengingatkan Menko Perekonomian, mengingatkan Menaker, ajak seluruh

*stake holder*. Tapi tidak diindahkan. Tiga kali Presiden menyampaikan, Desember, Januari dan Februari. Dan saya dengar RUU nya berubah lagi namanya sekarang. Karena kalau 'Cipta Lapangan Kerja' disingkat anak-anak 'Cilaka' namanya. Sekarang 'Cipta Kerja', jadi 'Cika-Cika' namanya.

Tapi yang penting buat kami adalah, saya yakin betul seluruh konfederasi buruh pasti tidak punya tujuan untuk menggoyang pemerintahan, tidak mungkin terjadi. Karena KSPSI ikut turun ke jalan. Itu saya jamin pada teman-teman Komisi IX. Yang penting buat kami bagaimana DPR nanti bisa mengajak serta buruh masuk di dalam tim pembahasan. Jadi kita detail, Ibu, bisa berargumentasi pasal per pasal. Kita siap untuk itu, karena kita punya tim dewan pakar. Jadi sekarang buruh sudah mengalami perubahan, Bang Rahmat Gobel.

Ini Abang saya, tadi malam baru ketemu, saya mohon untuk bisa menerima dengan kita. *Applause* buat Pak Rahmat Gobel ini, luar biasa. Tidak berubah walaupun sudah jadi Pimpinan DPR. Terima kasih Bang.

Yang penting buat kami itu, kita diajak bicara, kita berargumentasi dengan baik. Aksi buruh dari tahun 2010-2014 sangat kencang sekali. Aksi besar bisa 10 kali dalam setahun. Ketika era Pak Jokowi, aksi besar paling hanya 2-3 kali dalam satu tahun. Artinya apa, komunikasi sudah mulai terbangun. Jangan sampai di cedera di periode kedua. Ini yang ingin kita ingatkan kepada DPR dan Pemerintah.

Dulu Bung Obon ini termasuk pelopor tutup jalan tol tahun 2012. Karena sudah duduk di depan kami Bung Obon Tobroni ini. Saya bilang Bung Obon, "Bon, itu jangan sampai berubah kalau sudah duduk di gedung AC". Ternyata masih belum dia, masih tidak punya uang juga katanya.

Baik dari saya pengantar demikian. Nanti Bung Abdullah dan Bung Sekjen akan menambahkan. Sedikit-sedikit saja, mungkin 3 sampai 4 menit, supaya nanti Bapak/Ibu DPR bisa menanggapi.

Silakan Bung Sekjen, setelah itu Pak Abdullah.

## **SEKJEN KSPI:**

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

Bagi kami Cipta Lapangan Kerja itu juga kami dorong. Kenapa, karena makin banyak orang bekerja makin sejahteralah bangsa ini. tetapi yang tidak kami inginkan itu adalah, dengan menciptakan lapangan kerja seperti itu tetapi mengebiri atau mendegradasi hak-hak pekerja yang sudah ada.

Ingin kami sampaikan juga bahwa, hak-hak pekerja semenantara ini belumlah maksimal. Tapi cukup memadai. Karena belum maksimal, kalau dikurangi 'cukup memadai' itu menjadi hilang, 'tidak memadai' nantinya.

Oleh karena itu besar harapan kami melalui Komisi IX ini bahwa suara-suara teman-teman kami di bawah itu di dengar. Sudah waktunya negara ini memperhatikan dan mengayomi serta mendorong tingkat kesejahteraan dari pekerja khususnya dan rakyat pada umumnya. Oleh karena itulah pada pagi hari ini mendampingi Presiden SPSI/Bung Andi Gani Nenawea kami ingin sampaikan surat pernyataan sikap kami kepada Pimpinan Komisi IX. Nanti kami akan bacakan setelah teman-teman yang lain berbicara.

Terima kasih.

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalaam.*

**KETUA KSPI:**

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.*

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera, dan salam berkah untuk kita semua.

Ibu Pimpinan DPR yang kami hormati, Ibu Sri Rahayu;  
Pak Rahmat Gobel, Bung Obon, beserta seluruh jajaran Pimpinan.

Izinkan beberapa hal yang perlu kami sampaikan.

Yang pertama mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas nama keluarga besar SPSI di bawah kepemimpinan Andi Gani Nenawea. Yang dikatakan bahwa organisasi serikat pekerja terbesar di republik ini memang benar. Sesuai dengan Keppres 83/1998 pasca reformasi, serikat pekerja/serikat buruh tercatat tidak kurang dari 16 konfederasi serikat pekerja, dan tidak kurang dari 144 konfederasi serikat pekerja. Tapi kita patut bersyukur sampai hari ini konfederasi SPSI di bagan kepemimpinan Bung Andi Gani masih menjadi mayoritas. Atas dasar itu sangat layak ketika sebagai representasi keterwakilan dari kalangan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia. Atas dasar itu maka penghargaan kepada Pimpinan Dewan yang hari ini menerima kami.

Yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa, selaras dengan berbagai informasi yang berkembang *statement* pemerintah yang disampaikan oleh Menko Tenaga Kerja maupun menteri-menteri yang lain berkenaan dengan *omnibuslaw* tadi ada 9 isu yang sangat sensitive dan ada 9 isu yang sangat fundamental bagi kalangan pekerja yang cukup mencemaskan, antara lain:

1. Tentang perubahan jam kerja;
2. Sistem kerja;
3. Pekerja kontrak dan *outsourcing*;
4. Upah minimum;
5. Pesangon;
6. Tenaga kerja asing;
7. Liberalisasi berbagai sistem kerja, yang tadinya *long life* menjadi *fleksible employment*;
8. Jaminan sosial.

Dari 9 isu yang dianggap sangat sensitive dan sangat fundamental bagi kalangan pekerja sampai hari ini jelas ada semacam informasi yang simpang siur yang membuat kecemasan kolektif bagi kita bersama. Atas dasar itu melalui forum silaturahmi dan dialog pada hari ini harapannya juga kami ingin mendapatkan *copy* asli daripada *legal drafting* dari rencana pemerintah untuk membuat *omnibuslaw*. Itu yang pertama.

Jadi kami berharap banyak kalau DPR RI sudah memiliki rancangan undang-undang itu kami mohon untuk diberikan *copy*-nya dengan harapan kami dapat pelajari secara seksama apakah undang-undang ini pro kepentingan kaum pekerja dan masyarakat Indonesia atau pro untuk kepentingan kapitalis. Itu yang kedua.

Yang ketiga yang perlu kami sampaikan bahwa, ketika pemerintah memiliki *political will* untuk membuat undang-undang kami tidak bisa menghambat dan menghalangi. Tapi ada semacam pesan moral yang perlu kami sampaikan kepada DPR maupun kepada Pemerintah melalui DPR:

Yang pertama bahwa, jangan sekali-sekali membuat undang-undang yang menyimpang daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar demi kepentingan investasi dengan menggadaikan kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan mengabaikan kepentingan anak cucu kita. Contoh tenaga kerja asing umpamanya mau di liberalisasi, diberikan kebebasan yang luar biasa tanpa selektif, pada akhirnya kesempatan bagi pekerja Indonesia sudah barang tentu akan menjadi terbatas. Kita tahu bahwa konstitusi kita mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, atas dasar itu hak atas pekerjaan harus dijamin oleh undang-undang yang akan dibuat oleh pemerintah. Jangan di liberalisasi yang pada akhirnya kepentingan asing menjadi prioritas, dan kepentingan anak/cucu dan bangsa kita diabaikan.

Yang keempat yang perlu kami sampaikan kepada forum hari ini, khususnya kepada Pimpinan DPR, jangan sekali-sekali ajarkan kami, jangan sekali-sekali ajarkan eksekutif dan legislatif memilih kerendahan diri/rendah diri dihadapan kapitalis yang pada akhirnya kita menggadaikan semua kepentingan demi kepentingan kapitalis. Karena kami tidak pernah yakin terhadap keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif yang kita miliki sebagai bangsa. Kita bangsa Indonesia memiliki keunggulan komparatif, memiliki keunggulan kompetitif, yang tidak dimiliki oleh bangsa dan negara lain. Atas dasar itu kita tidak boleh rendah diri. Rendah hati boleh mungkin, tapi rendah diri dihadapan pemilik modal dengan mengorbankan undang-undang yang pada akhirnya dikorbankan kepentingan bangsa. Ini jujur kami sekali lagi kami akan katakan 'tidak' bagi masyarakat pekerja di seluruh Indonesia.

Tepuk tangan untuk teman-teman serikat pekerja.

Yang terakhir, contoh konkrit ini, kami 4-5 tahun yang lalu kunjungan kerja ke daerah/wilayah Wedabai. Dulu disitu ada tambang nikel terbesar mungkin di Indonesia. Sekarang menjadi Kawasan ekonomi khusus. Dulu pada waktu 5 tahun yang lalu kami kunjungan kerja disana. Ketika nyambut pakai bahasa Indonesia di *translate* pakai bahasa Inggris. Kemarin saya memberikan sambutan pakai bahasa Indonesia di *translate* pakai bahasa mandarin. Saya menyaksikan sendiri bahwa ternyata tenaga kerja asing dari yang *unskill* sampai yang semi *skill*, sampai *skill*, hampir

**KETUA RAPAT:**

Pak, dimana itu tadi?

**KETUA KSTPI:**

Wedabai Nikel.

**KETUA RAPAT:**

Sulawesi Tenggara ya.

**KETUA KSPI:**

Wedabai Nikel, boleh berkunjung kesana.

Kami pada waktu kasih sambutan, biasanya diberi sambutan tarian daerah, setelah itu seremonial. Tapi sambutan kali kemarin di *translate* pakai bahasa mandarin. Dan kami keliling, ternyata, mohon maaf, yang mengangkut piring dari cucian bak piring masukin ke bak motor yang roda tiga itu bukan masyarakat kita. Ini riil, atas dasar itu yang kami katakan bahwa kita tidak boleh di dalam memberikan ruang kepentingan investasi dengan mengorbankan kepentingan anak/cucu dan masyarakat bangsa Indonesia. Kita memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, kita harus *confidence* bahwa bangsa Indonesia memiliki keunggulan yang layak untuk dipertahankan agar orang yang butuh kita.

Kita tahu bahwa nikel adalah tambang untuk masa depan. Masa depan mungkin bensin sudah tidak dibutuhkan lagi, tapi mungkin aki sebagai bahan dari nikel adalah merupakan keunggulan kita.

Saya pikir itu sebagai satu catatan.

Terima kasih banyak.

*Billaahitaufiq Wal Hidaayah.*

*Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalaam.*

Masih ada, Mas Andi?

Masih? Silakan.

**KSPI:**

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.*

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

Yang kami hormati, Pimpinan Komisi IX beserta seluruh Anggota Komisi IX; Teman-teman SPSI beserta Pimpinan Federasi.

Yang pertama, perkenalkan nama saya Rojinto, saya Ketua Umum PBTSK/SPSI. Kami ingin mempertanyakan apakah memang sesuai dengan berita yang kami terima bahwa DPR setelah menerima *draft* resmi *omnibuslaw* Cipta Lapangan Kerja. Karena kemarin kami baca media disampaikan bahwa siang ini akan diserahkan ke DPR, siang kemarin maksudnya.

Yang kedua adalah, bahwa kami menerima *draft*, tadi malam beredar. Itu ada 964, itu sudah berbentuk pasal, bukan berbentuk kajian lagi, yang sudah beredar luas tadi malam. Dan *cluster* ketenagakerjaan ada 16 lembar dalam *draft* itu, dan disitu banyak hal yang merugikan buruh.

Yang pertama adalah, kami ingin juga penegasan dari pemerintah bahwa upah minimum yang di *draft* ini yang disampaikan pemerintah itu upah minimum UMP yang tidak dihapus. UMK dan UMSK itu dihapus dalam *draft* yang kami terima.

Kemudian ada pengurangan pesangon, dan ini resmi disampaikan oleh pemerintah, dari 36 menjadi 19 bulan gaji. Kemudian PKWT atau yang kita kenal dengan kontrak kerja itu terhadap semua jenis pekerjaan dan *outsourcing* tanpa ada



Batasan. Kemudian Pasal 90 tentang upah minimum itu juga dihapus. Kemudian Pasal 155 juga dihapus tentang mekanisme PHK.

Dan ini sudah beredar, sehingga kami ingin satu kepastian dari DPR, khususnya Komisi IX, apakah sudah ada *draft* tersebut. Kalau ada kami mohon ini untuk kami diberikan, agar informasi yang beredar di publik menjadi riil. Karena selama ini pemerintah membantah bahwa itu *draft* palsu. Justru yang kami pertanyakan *draft* aslinya mana. Sejak awal pembentukan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja ini kami menilai bahwa ini adalah terlalu pro terhadap dunia usaha, karena dari satgas yang dibentuk tadi sudah dijelaskan tidak adapun dari serikat pekerja. Dari segi pembentukannya pun sembunyi-sembunyi, tidak pernah terbuka, tidak pernah dilibatkan. Hanya diundang sosialisasi memaparkan *power point*, dianggap itu adalah bagian daripada sudah berdiskusi, sudah meminta pendapat dengan teman-teman pekerja. Dan respon serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan penolakan dalam merespon narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah yang menyampaikan bahwa nanti TKA dipermudah itu Menko. Kemudian ada upah per jam itu juga Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja. Jadi kita merespon itu.

Dan hari ini beredar ada *draft* yang menurut apakah ini resmi atau tidak kami juga mohon klarifikasi dari Komisi IX agar pasti. Kalau memang ini *draft*-nya sudah pasti kami akan menolak dan memohon kepada Komisi IX untuk mengeluarkan *cluster* ketenagakerjaan dalam RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja. Karena ada 11 *cluster*, kami minta khusus *cluster* ketenagakerjaan ini dikeluarkan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Pokoknya kita minta ini dikeluarkan. Karena sudah jelas, kalau *spirit*-nya mendegradasi hak-hak buruh sudah jelas kami, serikat pekerja/serikat buruh, bukan hanya KSPSI tapi hampir seluruh serikat pekerja pasti akan menolak dan melawan ini sampai kapanpun. Jadi mohon kami minta klarifikasi dari Komisi IX apakah sudah menerima. Kalau sudah menerima kami mohon diberikan *copy*-annya, supaya pasti, sehingga kami tidak meraba-raba, dan kami tidak lagi berprasangka buruk terhadap pemerintah "ini ada apa, kenapa sampai saat ini belum diserahkan". Akhirnya dengan sembunyi-sembunyi itu *su'udzon-su'udzon* akan muncul, kecurigaan-kecurigaan akan muncul. Apakah memang benar hak-hak buruh semuanya akan dihapus juga menjadi satu pertanyaan. Karena tadi malam, sekali lagi saya tegaskan, sudah beredar *draft*, 964 lembar *draft* tersebut. Dan itu sudah berbentuk pasal, di hapus-di hapus-di hapus. Apakah ini juga menjadi *draft* yang resmi atau tidak mohon penjelasannya.

Terima kasih.

*Billaahitaufiq Wal Hidaayah.*

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,  
Pak Wakil Pimpinan.

Satu hal yang kita sama-sama pikirannya, tadinya dari kami Komisi IX, saya yakin Pak Rahmat Gobel juga demikian, setuju apa yang disampaikan Bapak Abdullah jangan mengabaikan kepentingan bangsa dan negara ini untuk kepentingan kapitalis. Saya kira kita sepakat semua ini. Oleh karena itu kita

bersama-sama dari Komisi IX nanti juga akan melihat seperti apa sebenarnya *draft*-nya.

Terus terang kami Komisi IX .....Omnibuslaw ini sama sekali belum tahu. Karena memang belum terima. Oleh karena itu kalau Bapak/Ibu sekalian baik secara resmi maupun tidak resmi, kalau tidak resmi mungkin Bapak/Ibu sekalian juga terimanya ..... Kami terus terang tidak akan menerima hal-hal yang memang belum secara resmi disampaikan kepada Komisi IX, sehingga kami tidak tahu secara persis karena belum pernah menerima, maka isinya dari norma-norma atau pasal-pasal yang ada itu seperti apa. Kalau tadi Bapak menyebutkan katanya ada 964 halaman yang sudah beredar kami juga belum pernah menyentuh dan melihatnya. Sehingga nanti juga di konfirmasi. Kebetulan Pak Rahmat ada disini maka nanti Beliau saya berikan kesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian.

Dalam pikiran kita semua memang di Omnibuslaw ini dalam hal ini di benak kami semua Komisi IX bahwa dengan adanya hal tersebut harapan kita tentu akan memperbaiki hal-hal yang memang terdapat dalam pikiran kita begitu, hal-hal yang memang di dalam undang-undang antara satu dengan yang lain itu ada bertubrukan. Kemudian ada hal-hal yang memang selain tubrukan juga ada hal-hal yang menyulitkan di dalam implementasi. Tetapi kami tidak pernah punya pikiran sedikitpun bagaimana dengan adanya undang-undang yang baru nanti, Omnibuslaw, itu akan membuat seperti yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian ada mendegradasi hak dan sebagainya, saya kira kita tidak inginkan hal tersebut.

Oleh karena itu yang pertama bahwa, nanti ketika kami akan mendapatkan secara resmi, karena kalau tidak resmi berarti bisa *hoax*, apa yang kita terima pasti itu bukan menjadi sesuatu yang rahasia. Karena kalau sudah resmi itu siapapun biasanya bisa mengakses. Oleh karena itu kita nanti bisa komunikasi, Mas Andi, nanti *Insyah Alloh* kalau memang sudah ada kita bisa komunikasi sehingga kita bisa sama-sama untuk melihat bersama, mencermati bersama.

Yang kedua, nanti pun kita belum tahu siapa yang membahas ini. Apakah dibahas oleh Baleg, atau dibahas oleh Pansus. Karena kalau Pansus nanti pasti melibatkan, karena itu banyak komisi yang terlibat didalamnya tentu itu akan masuk dari Komisi IX pasti ada, harapan kita demikian tentu. Kalau itu Baleg, tentu yang punya kewenangan ada di Baleg. Tetapi menurut saya tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak-bapak sekalian dari serikat pekerja ini bisa memberikan masukan, saya kira tidak akan tertutup untuk itu.

Pak Rahmat dulu yang menyampaikan. Kita kan tidak terlalu panjang.

Saya persilakan Pak Rahmat untuk menyampaikan.

#### **WAKIL KETUA DPR RI (RAHMAT GOBEL):**

Pak Andi dan keluarga besar serikat pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini;

Kawan-kawan Anggota Dewan Komisi IX khususnya,

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

Salam sejahtera buat kita semuanya.

Saya ingin memberikan apresiasi atas masukan dan perjuangan daripada rekan-rekan/kawan-kawan dari serikat pekerja yang ingin memperjuangkan hak-haknya untuk anggota dari serikat pekerja yang dipimpin oleh Pak Andi khususnya.

Sebagai pimpinan saya sangat memahami. Saya kenal Pak Andi dan kawan-kawan dalam berjuang betul-betul sangat obyektif. Dan tentu saya juga memahami keinginan daripada semua untuk ikut bisa terlibat untuk membicarakan hal ini. Saya hadir untuk mendengarkan langsung apa yang disampaikan, dan saya sudah memahaminya.

Tentu tadi dikatakan kita jangan merendahkan diri kita, itu sudah pasti kita tidak akan merendahkan. Justru kita juga ingin bagaimana memperjuangkan investasi itu untuk memperjuangkan membangun sumber daya manusia kita sendiri. Saya juga memahami apa yang disampaikan.

Mengenai hal tadi surat sudah diterima, tadi sudah disampaikan bahwa memang resmi Pimpinan pun belum menerimanya. Jadi belum menerima resmi. Dan kemarin berita di koran juga kami tanyakan bahwa itu ada yang menyampaikannya. Tapi saya juga tidak tahu, tapi *oke* lah tidak usah kita persoalkan

Tapi juga yang saya ingin perlukan kepada rekan-rekan serikat pekerja, percayalah kepada DPR. Dan juga tentu DPR, khususnya Komisi IX kawan-kawan ini, memikirkan bagaimana kesejahteraan itu untuk seluruh bangsa Indonesia. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum bekerja. Tentu kita tahu kita tidak ingin yang sudah bekerja dipotong, tentu kami juga akan minta.

Kita musti secara riil melihat kenapa pemerintah mengadakan Omnibuslaw ini. Investasi ini dengan era globalisasi ini mulai turun semuanya. Investasi itu masuk ibarat kayak air, air itu mengalir kepada yang ke bawah. Tidak ada yang ke atas.

Karena saya ini juga pengusaha. Pak Andi tahulah kalau saya pengusaha. Trend semua negara turun, tapi yang naik itu adalah India dan Vietnam. Alasannya itu banyak. Baik itu tentang hal masalah kepastian hukum. Dan disinggung juga masalah ketenagakerjaan.

Memang ini banyak, tadi saya diskusi “kok sangat *complicated*”, yang memang harus kita urai. Dimana kita bisa mendapat investasi tetap ke Indonesia karena pasar kita besar, tapi tenaga kerja kita juga bisa mendapatkan manfaat daripada investasi itu sendiri. Ini semua pasti kami semua akan bekerja untuk itu. Karena tidak mungkin kita seperti tadi kita merendahkan, menjual, itu tidak ada sama sekali, karena kita juga tidak mau demikian.

Jadi itulah saya hadir untuk meyakinkan kawan-kawan di serikat pekerja. Kita akan berjuang secara obyektif, manfaat buat bangsa ini, buat keluarga kita yang belum dapat pekerjaan, dan juga buat yang sudah kawan-kawan di depan. Justru saya harapkan kawan-kawan juga bisa. Misalnya begini, saya mau tanya saja tapi, Pak Andi pakai produknya impor atau buatan dalam negeri? Kan masih banyak juga kawan-kawan Pak Andi yang pakai produk impor kan daripada produk dalam negeri. Kenapa tidak pakai produk dalam negeri? Karena lebih murah impor. Akhirnya kalau impor, pekerjaannya tidak ada, mengurangi produksi dalam negeri itu sendiri. Ini yang logik-logik saja. Saya pernah tanyakan, “habis dalam negeri katanya mahal”. Kalau mahal siapa lagi nanti, apa yang bisa kita buat. Ini harus ada *mutual understanding* dan *mutual respect*, dan kita musti *mutual benefit*.

Impor lebih murah kenapa, karena biaya tenaga kerja kita mahal. Kenapa investasi akhirnya musti keluar? Ini bagaimana caranya kita atasi. Itu tidak bisa hanya Komisi IX saja, harus komisi yang lain, kita harus duduk nanti bagaimana memecahkan semua persoalan.

Saya mau menyampaikan hal itu, oleh karena itu percayakan kepada kami semuanya untuk berjuang untuk itu. Kira-kira pertemuan hari ini kita sudah bisa menerima masukan semuanya dan bagaimana kita bisa diskusikan, mencari solusi-

solusi yang saling menguntungkan, menguntungkan buat bangsa ini buat secara total keseluruhannya.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Pak Andi sudah datang kemari untuk memperjuangkan kawan-kawan kita semuanya, tentu kita akan memperhatikan perjuangan itu semuanya.

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalaam.*

Terima kasih Pak Pimpinan.

**WAKIL KETUA DPR RI (RAHMAT GOBEL):**

Saya mohon izin, karena ditunggu rapat lagi. Karena katanya demonya agak lebih awal tadi, saya tunggu tidak datang-datang kan.

**KETUA KSPI:**

Sebelum pamit, Pimpinan, catatan kecil.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja 228 ini catatan mohon diadakan pemeriksaan. Keputusan Menteri Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 yang memberikan ruang dan kesempatan tentang tenaga kerja asing. Disitu ada 2221 jenis lapangan pekerjaan yang bisa di isi tenaga kerja asing. Atas dasar itu rasanya perlu dikaji ulang agar liberalisasi indikatornya Kepmen 228 ini perlu ditinjau kembali. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228/2019 tentang jabatan tertentu yang dimungkinkan ditempati oleh tenaga kerja asing kami pikir mohon dipelajari secara seksama sebagai bentuk komitmen DPR terhadap nilai-nilai kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsanya.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA DPR RI (RAHMAT GOBEL):**

Terima kasih untuk semuanya ya.

Saya mohon pamit karena saya ada ditunggu rapat. Jadi karena kemarin janji jam sepuluh (10.00) mau demo saya tunggu tidak datang-datang demo.

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita lanjut.

Saya kira sudah jelas ya, kita belum menerima secara formal, baik di Pimpinan DPR maupun Komisi IX. Dan tadi komitmen dari Pimpinan sudah disampaikan kepada Bapak-bapak sekalian. Saya kira kita bisa, kan tidak ada yang harus didiskusikan lagi kan ini, apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak harapkan pertama nanti kalau *draft* disampaikan, kemudian yang kedua libatkan. Nanti pasti kami minta masukan-masukan kalau nanti Komisi IX memang dilibatkan

di dalam pembahasan itu. Kalau tidak, berarti harus ke Baleg kalau yang membahas itu Baleg.

Sebenarnya harapan kita/Komisi IX ini bisa, karena sebagian besar ini materi-materinya adalah Komisi IX ada sendiri, komisi ini ada sendiri. Harapan kita dari Komisi IX ini ada yang terlibat didalamnya.

Oke, saya kira demikian.

Bapak/Ibu sekalian, cukup? Ada lagi yang disampaikan?

#### **KETUA KSPI JAKARTA:**

Terima kasih Ibu Sri, mohon izin.

Saya hanya mengingatkan posisi *omnibuslaw*. *Omnibuslaw* itu kan biasa digunakan di negara yang mempunyai sistem hukum *common law*, sementara negara kita kan sistemnya *civil law*.

*Omnibuslaw* itu apa sebenarnya? *Omnibuslaw* itu adalah merangkum banyak undang-undang menjadi satu undang-undang. Sehingga saya hanya mengingatkan teman-teman DPR RI untuk mengingatkan pemerintah posisi *omnibuslaw* itu arahnya kemana? Karena tidak ada undang-undang yang membawahi undang-undang lain. Karena sistem negara kita kan *civil law*, sementara *omnibuslaw* biasanya digunakan untuk *common law*. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ada di hukum juga yang namanya *lex specialist*, *derogate*, *lex generalis*. Apakah *omnibuslaw* itu menjadi *specialist* atau Undang-Undang Tenaga Kerja yang menjadi *generalis*? Itu yang posisi kedudukan hukum itu yang teman-teman DPR coba mengingatkan kepada pemerintah posisi *omnibuslaw* itu ada di posisi mana sebagai payung hukum yang membawahi undang-undang lain, atau posisinya sama dengan undang-undang lain menjadi *lex specialist*.

Kira-kira seperti itu.

Terima kasih.

Selamat siang.

*Wabillaahitaufiq Wal Hidayaaah.*

*Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

#### **KETUA SPSI SURABAYA:**

Terima kasih.

Saya Sukarji/Ketua Pimpinan Daerah SPSI Provinsi Jawa Timur.

Kami jauh-jauh dari Surabaya ingin menyampaikan beberapa hal. Diantaranya adalah yang pertama, seperti yang disampaikan pimpinan-pimpinan kami sebelumnya, kita menolak *cluster* ketenagakerjaan masuk di dalam RUU Omnibuslaw ini. Karena *cluster* ketenagakerjaan ini berkutat pada Undang-Undang 13 Tahun 2003. Mengingat seperti tadi disampaikan oleh Wakil Presiden KSPSI ada beberapa pasal, pesangon, hubungan kerja, upah minimum, dan lain sebagainya. Dari pasal-pasal Undang-Undang 13 Tahun 2003 itu sudah diatur melalui peraturan-peraturan dibawahnya. Seperti upah, ada Peraturan Pemerintah Nomor 78, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan lain sebagainya. Begitu satu pasal saja di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 ini dicabut melalui *cluster* ketenagakerjaan dalam *omnibuslaw* artinya semua aturan itu menjadi tidak berlaku dan tidak ada.

Kalau semua aturan menjadi tidak ada dan tidak berlaku lagi, ini penyelesaian konflik di bawah itu luar biasa hebatnya.

Kami dari Jawa Timur ingin menyampaikan situasi dan kondisi di daerah bahwasanya terkait dengan *omnibuslaw* inikan sampai sekarang pun kita mendengarkan penjelasan dari Pimpinan Komisi IX belum memegang, bahkan melihat bagaimana *omnibuslaw* itu yang sebenarnya.

Kami di daerah luar biasa. Kami di agitasi oleh informasi-informasi yang luar biasa di Jawa Timur. Sehingga kami datang ke Jakarta untuk minta penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dan kami dari Jawa Timur ini juga tidak sendiri. Kami datang kesini berangkat kemarin pagi, datang disini jam tiga pagi (03.00) tadi bersama rombongan tiga bus dari Jawa Timur, ada 150 orang yang ada di depan sana tergabung dengan kawan-kawan se-Indonesia.

Kemudian sekali lagi yang perlu kami sampaikan. Karena ketidakpastian, baik kami, wakil-wakil serikat pekerja atau pimpinan-pimpinan kami yang ada di Jakarta, konfederasi dan federasi-federasi yang lain, bahkan Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan juga belum tahu dan belum melihat betul *omnibuslaw* ini.

*Omnibuslaw* dibahas silakan, tapi mohon untuk *cluster* ketenagakerjaan dikeluarkan dari *Omnibuslaw* Cipta Lapangan Kerja itu sendiri. Karena banyak aturan turunan yang nantinya akan terus terang merepotkan pekerja-pekerja yang ada di bawah, yang ada di daerah. Karena seperti pengupahan dan seperti sistem hubungan kerja, macam-macam, semua peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang ada dibawahnya juga tidak akan berlaku sebagaimana mestinya.

Itu saja tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.

Saya akhiri,

*Ihdinash shiroothol mustaqim*

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

## **PRESIDEN KSPI:**

Saya musti mengingatkan kepada Komisi IX, pada saat pembahasan nanti Komisi IX mengundang konfederasi-konfederasi yang terverifikasi di Kemenaker. Jadi sudah jelas, KSPSI paling besar, ada KSPI, ada KSBSI, dan banyak konfederasi lain, supaya ada keterwakilan yang jelas.

Yang kedua, saya mendengar baru saja di WA hari ini/siang ini Menko akan hadir ke DPR sebentar lagi bersama Menteri Tenaga Kerja untuk menyerahkan *draft* RUU. Siang ini katanya jam 14.30. Saya baru di WA barusan sama teman-teman di istana. Artinya Komisi IX sudah menerima.

Dan saya mengingatkan satu hal adalah, kalau tidak mengajak serikat buruh dari awal saya pastikan pada isu ini seluruh konfederasi buruh dalam sikap posisi melawan dengan sangat keras. Termasuk KSPSI yang ditunggu-tunggu oleh pers dan media apakah turun ke jalan, akhirnya kami sebagai konfederasi buruh terbesar pendukungnya Pak Jokowi tetap turun ke jalan. Ini pertanyaan besar kalau semua konfederasi buruh sudah memutuskan turun ke jalan, pasti akan beresiko sangat besar.

Saya tidak ingin terjadi seperti 2012 ada mogok nasional, ada penutupan jalan tol, itu kita hindari betul. Kami sudah sangat-sangat dewasa saat ini, sangat berubah dalam pola gerakan. Ini jalan akhir kami untuk turun ke jalan. Diskusi

sudah, kirim surat sudah, melakukan FGD sudah, dan akhirnya demo turun ke jalan yang harus kita lakukan.

Terima kasih buat seluruh fraksi yang hadir disini, Pak Melki, Bung Obon, Pak Abidin Fikri, Pak Rahmad Handoyo. Mbak Tjiptaning ini guru demo saya. Jadi saya harap nanti Komisi IX bisa kedepan, karena ada puluhan ribu masyarakat buruh di depan. Saya tidak ingin mengganggu kondisifitas masyarakat ketika Komisi IX mendampingi kami keluar dan menyampaikan bahwa DPR bersama buruh Indonesia. Saya akan membubarkan anggota saya untuk kembali ke tempat masing-masing. Karena saya khawatir kalau bertahan sampai sore agak sangat berat dan merepotkan masyarakat Jakarta.

Sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa Komisi IX jangan juga menjadi sembunyi-sembunyi seperti pemerintah. Kita pegang janjinya para fraksi di DPR, setuju?

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Bapak/Ibu sekalian,  
Selanjutnya, Pak Abidin, silakan.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H):**

Terima kasih.

Hidup Buruh!

Pimpinan/Anggota DPR Komisi IX yang kami hormati,

Saya ingin menyampaikan saja, ini memang akhir-akhir ini memang via WA setiap anggota Komisi IX pasti ditanyakan soal ini, dan pasti jawabannya “kita belum menerima”. Karena memang begitu.

Jadi harus ini *clear* dulu dari awal Pak. Omnibuslaw berkaitan dengan RUU Cipta Lapangan Kerja itu adalah usulan pemerintah, bukan DPR. Pembahasannya nanti bersama pemerintah setelah diserahkan kepada DPR oleh pemerintah. *Draft* yang berseliweran yang katanya ada sekian pasal, yang sudah mungkin ada juga diundang oleh kementerian atau asosiasi, itu bukan bahan yang *official* yang bisa dipakai untuk dibahas. Jadi infonya begitu kan, *cluster* tenaga kerja semacam itu-sembesem semacam itu. Kita agak susah menanggapi yang itu. Tapi prinsipnya, tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, baik Pimpinan, kita sama-sama dalam memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman buruh. Kalau Pak Andi menyampaikan bahwa akan sampai sore ini ya kita tunggu saja itu. Karena menanggapi agak susah Pak.

Oleh karena itu pada asosiasi, kita pun juga belum tahu itu undang-undang ini akan dibahas di Komisi IX atau tidak. Karena tata caranya setelah masuk ke DPR, baru diagendakan oleh Bamus akan diletakkan dimana itu undang-undang itu, apakah di Pansus atau di Badan Legislasi. Pembahasannya konon katanya sekian pasal. Ribuan atau berapa pasal konon katanya. Tapi secara jelas norma-normanya kita belum tahu itu.

Berkaitan dengan pertanyaan Bung Willi, apakah *omnibuslaw* itu kedudukan hukumnya dalam sistem hukum kita? Karena *civil law* dengan *commonlaw* juga tentu berbeda. Ini soal *omnibuslaw* itu soal metode bagaimana yang berserakan di undang-undang. Katanya ada 74 undang-undang, kemudian ada yang bilang 104 undang-undang, ya belum tahu juga kita. Itu memang di beberapa negara digunakan itu *omnibuslaw*.

Jadi tidak ada kaitannya apakah undang-undang setelah diundangkan itu nanti keseluruhan undang-undang yang pasalnya dimasukkan di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu akan tidak berlaku, tidak juga. Karena tidak keseluruhan. Misalkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bisa jadi tidak keseluruhan pasal itu dimasukkan ke *omnibuslaw*, hanya bagian-bagian saja misalkan. Tetapi berlaku.

Saya kira tidak perlu khawatir teman-teman. Undang-undang itu kita lihat saja nanti bagian-bagiannya. Bagian *cluster* katakanlah, kalau ada *cluster* ketenagakerjaan kita lihat, kita cermati sama-sama. Tentu nanti pembahasannya kalau sudah ditentukan Pansus ataupun di Baleg tentu ada rapat dengar pendapat.

Tadi usulannya konfederasi serikat pekerja betul berkaitan dengan pembahasan itu kita harus undang. Kalau jatuh di Komisi IX harus di undang. Kalau di Baleg mungkin juga kita usulkan ke Baleg agar katakanlah teman-teman konfederasi serikat buruh yang terdaftar itu di undang. Termasuk juga kepada Pansus.

Saya kira posisi Komisi IX masih *wait and see* (menunggu). Syukur *alhamdulillah* walaupun di Baleg maupun di Pansus saya tidak optimis itu akan diletakkan undang-undang itu di Komisi IX, karena banyak undang-undang yang berkaitan dengan komisi yang lain. Dugaan saya, kalau tidak di Baleg itu di Pansus. Karena konsern dari Komisi IX mungkin hanya bagian dari ketenagakerjaan.

Saya kira itu, Ibu Ketua. Saya kira kita berikan *applause* kepada teman-teman konfederasi yang datang pada hari ini.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalaam.*

Saya kira sudah jelas ya, Mas Andi, komitmennya kita dalam arti nanti ketika ada pembahasan, dan barang itu sudah betul-betul resmi ada di tangan, apakah Komisi IX atau Pansus, atau mungkin Baleg nanti sudah jelas, yang jelas komitmen dari kawan-kawan bagaimana melibatkan melalui undangan ataupun rapat dengar pendapat dari para serikat.

Saya kira demikian dan terima kasih. Masukan ini sudah saya sampaikan ke sekretariat untuk di catat, di rekam, sehingga ini nanti juga sebagai bahan ketika ada pembahasan.

Saya kira demikian dan terima kasih kepada Mas Andi beserta Pak Abdullah dan Pak Sekjen dan kawan-kawan yang hadir bersama-sama untuk memberikan masukan kepada Komisi 9, dan teman-teman Komisi IX yang sudah hadir pada kesempatan ini.

Untuk mengakhiri acara ini marilah kita sebelumnya ucapkan do'a dulu, kita tutup dengan do'a menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.

Berdo'a dimulai.



(DOA BERSAMA)

Terima kasih.

Dengan ucapan syukur *alhamdulillahirobbil'aalamiin* pertemuan rapat dengar pendapat pada siang hari ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.45 WIB)

Jakarta, 12 Februari 2020

a. n. KETUA RAPAT

Sekretaris Rapat

Yanto Supriyanto, S.H

NIP. 196305241992031001